

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA DI RAJAPURBAWA KABUPATEN BANJARNEGARA

Oleh:

Thomas Agung Bayu Wicaksono, Zainal Hidayat, Dewi Rostyaningsih

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id
Email: agungbayu17@yahoo.com

ABSTRACT

Fisheries is human activities that deals with the management of resources and the utilization of biodiversity waters. In Indonesia according to law of Republic Indonesia no. 9/1985 and law of Republic Indonesia no. 31/2004 activities including in fishery started from before production, of production processing up to marketing that have been undertaken in a business systems fishery. In this way fisheries can be considered is a business agribusiness. The government made study of potentials in the fisheries sector where the trend in modern times is industrialization. While the findings in the field is of the increase in a good enough in term of production a food fish and the number of fisheries agents under cultivation that increase significantly. Of the findings that governments create a program that enables the formation of an industrial area good fishery of the stage before production, of production processing the result of production to the stages of marketing. The program is called Minapolitan program which was set in PERMENKP NO. PER.12/men/2010 about Minapolitan.

The purpose of this research is to find the implementation of Minapolitan program in Rajapurbawa area in Banjarnegara regency and to know the motivation factor and an impediment to implementation of Minapolitan program in Rajapurbawa area in Banjarnegara regency. The theory used among others the theory of public administration, public policy, and the implementation of policy. Type of research is the type used by descriptive approach qualitative research method. The subjects in this research are 4 people who is chairman of the field in each team Minapolitan on them, and 2 people from a member of one of the field in the team Minapolitan on them. While data collection techniques conducted by interviews and the study of literature. Data analysis done by the technique of the data, the reduction of data, and withdrawal of the presentation of conclusions and verification.

The results of the study showed that the implementation of the program Minapolitan in Banjarnegara regency seen from 5 policy indicators the accuracy still reap negative value where there was 3 indicators that has not been right and only 2 indicators that have done exactly in the implementation. This was due to the fact that various factors that hampers the implementation of programs namely resources, factors communication between the organization as disposition, and the organizational structure.

Keyword: Fisheries, Minapolitan, The Implementation of Policy

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2010 produksi perikanan tangkap mencapai 5.039.446 ton dan dengan jumlah nelayan 2.162.442 orang, sehingga rata-rata nelayan per tahun hanya memperoleh hasil tangkapan 2,3 ton/nelayan (pendapatan kotor, belum termasuk biaya operasional). Dengan demikian, secara rata-rata hasil tangkapan nelayan Indonesia tampaknya sulit untuk mensejahterakan nelayan secara keseluruhan. Berdasarkan angka tersebut, tampak bahwa perikanan tangkap di Indonesia sulit untuk dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Secara umum, produksi perikanan tangkap dunia sudah mengalami stagnasi dan sudah mencapai titik optimal sehingga tidak mungkin untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi perikanan yang masih belum dimanfaatkan dengan baik dan terus akan dapat ditingkatkan sejalan dengan tingkat teknologi yang digunakan adalah sumberdaya perikanan budidaya.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah melakukan pengkajian terhadap potensi-potensi di sektor perikanan dimana tren pada jaman modern adalah industrialisasi. Sedangkan temuan yang ada di lapangan adalah adanya peningkatan yang cukup bagus dalam hal produksi ikan konsumsi dan jumlah pelaku perikanan budidaya yang ikut meningkat. Dari temuan tersebut pemerintah membuat suatu program yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan industri perikanan baik dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan hasil produksi, hingga tahap pemasaran. Program tersebut dinamakan program Minapolitan yang ditetapkan dalam PERMENKP NO. PER 12/men/2010 tentang Minapolitan.

Kabupaten Banjarnegara yang merupakan lokus dari penelitian ini memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan di bidang perikanan budidaya dengan unsur-unsur pendukung seperti cuaca, kontur tanah, dan aliran air sungai besar. Namun dalam pelaksanaan program Minapolitan Nampak sebuah ironi dimana pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Rajapurbawa dinilai lambat. Sejak dimulai pada tahun 2011 hingga 2015 belum nampak perkembangan yang signifikan dengan adanya program Minapolitan. Beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti ketika melakukan prasurvey terkait implementasi program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara antara lain: 1) Pembangunan di kawasan Rajapurbawa tidak mengikuti masterplan yang telah dibuat oleh tim konsultan; 2) Muncul dugaan adanya ego sektoral yang dirasakan oleh Bidang Perikanan Dintankannak Banjarnegara karena pihak-pihak yang terlibat dalam program Minapolitan dinilai kurang memberikan kontribusinya.

Berdasarkan hasil temuan masalah ketika prasurvey dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program Minapolitan di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara sehingga hal tersebut dijadikan dasar dilakukannya penelitian ini

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara.

C. Teori

Prinsip dasar implementasi kebijakan yang efektif (Nugroho, 2011: 650-652)

1. Ketepatan kebijakan
Ketepatan kebijakan disini adalah hal-hal mengenai kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Kemudian sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksana
Ketepatan pelaksana berkaitan dengan berapa dan siapa saja pihak-pihak yang dipilih untuk melaksanakan sebuah kebijakan/program serta keterlibatan pihak swasta dan masyarakat.
3. Ketepatan target
Ketepatan target berkaitan dengan dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar lokasi yang menjadi target kebijakan serta masyarakat di lokasi tersebut.
4. Ketepatan lingkungan kebijakan
Ada dua lingkungan yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan maupun program, yang pertama yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri dari *public opinion* yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta *individuals* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam

menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan proses
Ketepatan proses disini secara garis besar melihat bagaimana para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan dilihat dari apakah mereka telah memahami, menerima, dan siap untuk menjadi bagian dari kebijakan bagi masyarakat target kebijakan dan siap menjadi pelaksana kebijakan bagi pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar Organisasi
4. Disposisi
5. Struktur Birokrasi

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian
Penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mendiskripsikan implementasi dan permasalahan dalam program penanggulangan TB di Kabupaten Semarang.
2. Situs Penelitian
Pada penelitian ini wilayah yang diambil dalam penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
3. Subjek Penelitian
4. Penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. Dimana membutuhkan narasumber yang dipercaya dan memiliki wawasan serta pandangan luas mengenai program pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian ini informannya adalah:
 1. Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Banjarnegara selaku ketua pokja bidang 1.

2. Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Banjarnegara selaku ketua pokja bidang 2.
 3. Kabid Cipta Karya DPU Kabupaten Banjarnegara selaku anggota pokja bidang 2.
 4. Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Banjarnegara selaku anggota pokja bidang 2.
 5. Staf Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda Kabupaten Banjarnegara selaku anggota pokja bidang 3.
 6. Kabid Perikanan Dintankannak Kabupaten Banjarnegara selaku ketua pokja bidang 5.
5. Jenis Data
 Penelitian ini menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2010: 20).
6. Sumber data
 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.
 Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
7. Teknik Pengumpulan Data
 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :
1. Interview (wawancara)
 Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar penulis bebas untuk menanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan data dan informasi. Sehingga tidak ada batasan untuk penulis dalam menggali informasi
 2. Dokumentasi
 Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
 3. Studi pustaka
 Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi dan media yang berkaitan dengan program pengendalian Tuberkulosis, dalam hal ini adalah pedoman strategi pengendalian Tuberkulosis
8. Analisis interpretasi data
 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis Komponensial. Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data:
1. Penggelaran Hasil Observasi dan Wawancara.
 Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan berkali-kali, digelar pada lembaran-lembaran yang mudah dibaca. Data-data tersebut pada tahap ini tidak perlu dikelompokkan sesuai dengan domain dan atau sub-domain yang telah dipilih, yang penting bahwa hasil-hasil observasi dan wawancara dapat dibaca dengan mudah. Dari data-data pada tahap ini sesungguhnya peneliti telah dapat melakukan editing terbatas pada tahap tersebut.
 2. Pemilihan Hasil Observasi dan Wawancara.
 Penelitian selanjutnya melakukan pemilihan terhadap hasil wawancara. Artinya, hasil wawancara tersebut dipilih menurut domain dan atau sub-domain tanpa harus

mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal.

3. Menemukan Elemen-elemen Kontras.

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilihan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

9. Kualitas data

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. (Sugiyono, 2009: 241).

PEMBAHASAN

Implementasi program pengembangan kawasan Minapolitan perikanan budidaya di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara:

1. Ketepatan Kebijakan

Fenomena ketepatan kebijakan dilihat dari kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang akan dipecahkan telah tepat. Karena dalam fenomena tersebut terdapat faktor pendorong yakni tujuan kebijakan. Dalam hal ini tim Pokja Minapolitan telah memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan utama dari program Minapolitan sehingga pemahaman tentang tujuan utama dari program Minapolitan tersebut digunakan mereka untuk menjadi sebuah pegangan dalam melaksanakan program Minapolitan. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan dapat menterjemahkan bahwa program Minapolitan ini mengusung misi dan manfaat yang cukup banyak.

Kemudian dilihat dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan juga telah tepat. Hal ini dikarenakan terdapat faktor pendorong implementasi program Minapolitan yakni tujuan kebijakan. Tim Pokja selaku implementator telah

memahami apa saja yang menjadi tujuan dari program Minapolitan. Tujuan tersebut cukup jelas dan mudah dipahami. Apa saja yang ingin dicapai dalam program Minapolitan juga masuk akal, tidak berlebihan, dan sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Rajapurbawa. Berbekal pemahaman terhadap target dan tujuan yang diusung program Minapolitan, tim Pokja selaku implementator program Minapolitan menjadi terpacu untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan begitu komitmen mereka menjadi terbangun dan menjadi bersemangat untuk saling bekerja sama mewujudkan cita-cita program Minapolitan.

2. Ketepatan Pelaksana

Fenomena ketepatan pelaksana dilihat dari ketepatan pemilihan aktor/pelaksana program Minapolitan belum tepat. Jika dilihat dari sisi pemilihan siapa-siapa saja yang menjadi pelaksana atau yang masuk ke dalam tim koordinasi dan tim pokja program Minapolitan, hal tersebut sudah tepat sesuai dengan kebutuhan dalam arti jumlah dan sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Minapolitan. Namun ketika melihat dari sisi keefektivannya, dalam arti menilai kontribusi yang sudah diberikan oleh masing-masing pihak yang masuk ke dalam tim koordinasi dan tim pokja, hal tersebut masih menuai nilai yang negatif. Dengan kata lain belum semua dari pihak-pihak yang termasuk dalam tim koordinasi dan tim pokja telah memberikan kontribusinya untuk program Minapolitan. Sedangkan yang sudah memberikan kontribusinya pun dinilai masih minim kontribusi. Fenomena yang terjadi tersebut di atas disebabkan oleh adanya faktor penghambat implementasi program Minapolitan yaitu disposisi, bahwa sebagian besar dari pihak-pihak yang terkait belum memberikan respon yang positif kepada program Minapolitan. Bahkan lebih dari pada itu masih cukup banyak pihak yang belum memahami

secara menyeluruh tentang program Minapolitan. Faktor penghambat lainnya yaitu komunikasi antar organisasi. Dalam hal ini komunikasi yang terjalin di antara instansi-instansi yang terkait dalam program Minapolitan masih belum optimal. Disamping itu semua faktor struktur birokrasi juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara. Struktur birokrasi yang dimaksud adalah fragmentasi, dimana tanggung jawab sebuah kebijakan dibagikan kepada seluruh pihak terkait yang tersusun dalam tim koordinasi dan tim pokja sehingga memerlukan adanya koordinasi. Dalam penentuan berapa banyak dan siapa saja yang terlibat dalam program Minapolitan hendaknya memperhitungkan tingkat kesulitan dalam melakukan koordinasi karena semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin sulit koordinasi yang baik dapat terwujud.

Kemudian jika dilihat dari keterlibatan swasta dan masyarakat juga belum tepat karena mekanisme pemberian bantuan dari perusahaan swasta kepada masyarakat belum sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat implementasi program Minapolitan yaitu komunikasi antar organisasi. Jika dilihat hanya dari sisi keterlibatan pihak swasta dalam implementasi program Minapolitan, pihak swasta sudah bisa dikatakan terlibat karena telah berkontribusi memberikan berbagai bentuk bantuan. Namun di lain sisi, masih ada suatu persoalan yang perlu diperbaiki yaitu mekanisme pemberian bantuan dari swasta kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target

Fenomena ketepatan target dilihat dari respon dan kesiapan masyarakat di kawasan Rajapurbawa dalam melaksanakan program Minapolitan telah tepat. Hal itu dikarenakan adanya faktor pendorong yaitu kondisi lingkungan alam dan masyarakat di kawasan Rajapurbawa tersebut. Lingkungan dimana program Minapolitan dilaksanakan merupakan

suatu kawasan yang memiliki potensi yang bagus untuk melukan usaha baik di bidang pertanian, peternakan, dan secara khusus untuk perikanan. Karena di kawasan tersebut terdapat beberapa hal penting yang dapat menjadi daya dukung untuk melakukan usaha-usaha tersebut. Di antaranya terdapat 3 aliran sungai yang cukup besar sehingga memenuhi kebutuhan akan air, kontur tanah yang relatif datar, dan cuaca yang relatif stabil dan cocok sehingga sangat mendukung untuk melakukan usaha di bidang-bidang tersebut. Selain dari kondisi lingkungan alam, kondisi sosial masyarakat di kawasan Rajapurbawa juga sangat mendukung untuk dilaksanakannya program Minapolitan tersebut. Sebelum adanya program Minapolitan, sudah banyak masyarakat di kawasan Rajapurbawa yang memiliki keahlian sebagai pembudidaya ikan yang sekaligus dijadikan sebagai mata pencaharian.

4. Ketepatan Lingkungan Kebijakan

Fenomena ketepatan lingkungan dilihat dari interaksi di lingkungan kebijakan yakni antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan antara pelaksana kebijakan yang satu dengan pelaksana kebijakan yang lainnya belum tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yakni komunikasi antar organisasi di lingkungan instansi-instansi pelaksana program Minapolitan. Interaksi yang terjalin di antara instansi-instansi pelaksana program Minapolitan dinilai belum optimal dikarenakan faktor komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik.

Kemudian jika dilihat dari interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat juga belum tepat. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat implementasi program Minapolitan yakni komunikasi antar organisasi. Komunikasi antara organisasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pelaksana program Minapolitan dengan lembaga strategis

khususnya media massa baik cetak, radio, internet, reklame, maupun televisi. Koordinasi dengan lembaga strategis khususnya media massa sangat perlu dalam pelaksanaan program Minapolitan karena lembaga strategis dapat membantu dalam hal sosialisasi program kepada masyarakat melalui perannya masing-masing.

5. Ketepatan Proses

Fenomena ketepatan proses dilihat dari bagaimana para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan dilihat dari apakah mereka telah memahami, menerima, dan siap untuk menjadi bagian dari kebijakan bagi masyarakat target kebijakan dan siap menjadi pelaksana kebijakan bagi pemerintah belum tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang menghambat implementasi program Minapolitan yakni disposisi. Disposisi yang dimaksud adalah komitmen dari seluruh instansi yang tergabung dalam tim koordinasi dan tim pokja dalam melaksanakan program Minapolitan. Faktor lain yang ikut serta menghambat implementasi program Minapolitan adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini adalah anggaran. Seluruh instansi yang tergabung dalam tim koordinasi dan tim pokja program Minapolitan mengeluhkan hal yang sama yakni anggaran. Lambatnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan Rajapurbawa serta minimnya kegiatan-kegiatan dari masing-masing instansi untuk mendukung program Minapolitan hampir semuanya disebabkan oleh minimnya anggaran atau bahkan tidak ada anggaran untuk program Minapolitan. Selain kedua faktor di atas masih terdapat faktor lain yang juga menjadi penghambat implementasi program Minapolitan yakni struktur birokrasi. Struktur birokrasi disini yang pertama adalah mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa dalam melaksanakan program Minapolitan ini tidak ada SOP yang digunakan dalam suatu kegiatan maupun program

pemerintah. Sedangkan faktor struktur birokrasi kedua yang juga merupakan faktor penghambat proses implementasi program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara adalah fragmentasi. Pembagian tanggung jawab yang terlalu tersebar membuat susunan struktur organisasi dalam pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara menjadi terkesan terlalu lebar atau dengan kata lain terlalu banyak pihak yang terlibat sedangkan tugas yang dibebankan terbilang cukup minim. Inti dari permasalahan fragmentasi ini adalah koordinasi yang sulit dilaksanakan dengan baik lantaran terlalu banyak pihak yang terlibat. Artinya dalam hal ini koordinasi di dalam sebuah kebijakan maupun program dianggap sebagai sebuah hal yang justru menghambat proses implementasi kebijakan tersebut karena pada umumnya koordinasi yang dilaksanakan sangat lemah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara dilihat dari lima indikator ketepatan implementasi program dapat dikatakan belum optimal dikarenakan masih terdapat tiga indikator ketepatan implementasi program yang masih belum tepat dari keseluruhan lima indikator. Ketiga indikator yang belum tepat tersebut adalah ketepatan pelaksana, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Sedangkan dua indikator ketepatan implementasi yang telah tepat adalah ketepatan kebijakan dan ketepatan target.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program

Tujuan kebijakan, sumber daya kualitas dan kuantitas personel implementator, serta kondisi geografis dan masyarakat di kawasan Rajapurbawa menjadi faktor pendorong implementasi program pengembangan kawasan Minapolitan perikanan budidaya di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara. Kejelasan tujuan dan pemahaman implementator menjadi sebuah patokan atau pegangan mereka dalam melaksanakan program Minapolitan. Hal tersebut berpengaruh dalam proses pelaksanaan program Minapolitan, karena dengan memahami apa yang menjadi tujuan program Minapolitan akan memudahkan implementator dalam melaksanakan tugasnya dan sekaligus menumbuhkan rasa semangat dan komitmen yang bagus untuk mensukseskan program Minapolitan. kualitas dan kuantitas personel implementator yang mencukupi serta kondisi geografis dan masyarakat di kawasan Rajapurbawa dimana program Minapolitan dilaksanakan merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi yang bagus untuk melukan usaha baik di bidang pertanian, peternakan, dan secara khusus untuk perikanan. Karena di kawasan tersebut terdapat beberapa hal penting yang dapat menjadi daya dukung untuk melakukan usaha-usaha tersebut.

Disisi lain faktor sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, komunikasi antar organisasi, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi penghambat implementasi program pengembangan kawasan Minapolitan perikanan budidaya di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara. Dana yang digunakan untuk melaksanakan program Minapolitan berasal dari anggaran tahunan yang dimiliki masing-masing instansi yang berasal dari APBD Kabupaten

Banjarnegara dan tambahan dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), namun besaran DAK tidak menentu setiap tahunnya. Besaran dana yang dialokasikan untuk program Minapolitan dinilai masih sangat kecil mengingat kebutuhan akan yang sangat besar khususnya untuk infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alokasi khusus dari APBD untuk program Minapolitan. Sarana dan prasarana yang ada di kawasan Minapolitan yaitu Rajapurbawa belum mencukupi. Baru hanya sekitar 20% saja yang sudah terbangun jika disesuaikan dengan DED (Detail Engineering Design). Komunikasi antar organisasi dalam bentuk koordinasi di antara instansi-instansi yang terlibat dalam program Minapolitan belum berjalan dengan baik. Tidak semua anggota hadir pada rapat koordinasi yang telah diselenggarakan. Hal tersebut menghambat implementasi program Minapolitan karena koordinasi dan kerja sama yang solid sangat diperlukan dalam program ini. Komunikasi antara pemerintah dengan perusahaan swasta yang memberikan bantuannya juga belum berjalan dengan baik dimana belum ada koordinasi yang baik dalam mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat. Respon implementator secara individu program Minapolitan bermacam-macam, ada yang baik ada juga yang masih kurang, ada yang antusias di awal namun antusias tersebut berkurang seiring berjalannya waktu. Selain itu, terkait respon secara kelompok/instansi, ditemukan pula fenomena ego sektoral dimana masing-masing SKPD masih terkesan enggan berkontribusi untuk program Minapolitan dan hanya fokus kepada tugas rutin masing-masing SKPD. Dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara belum ada SOP yang mengatur tentang pelaksanaan program Minapolitan. Selain itu fragmentasi atau pembagian tanggung jawab program kepada instansi-instansi terkait terlalu banyak sehingga membutuhkan koordinasi dimana

koordinasi memiliki kecenderungan menghambat implementasi program. Semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin sulit dalam melakukan koordinasi.

SARAN

Terkait faktor-faktor penghambat implementasi program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. Saran untuk sumber daya anggaran maupun sarana dan prasarana, hendaknya untuk mengatasi minimnya anggaran yang dikeluhkan oleh seluruh implementator harus ada sebuah kesepakatan yang dibuat antara pihak eksekutif dan pihak legislatif terkait rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara dimana di dalam APBD harus ada anggaran khusus untuk program Minapolitan selanjutnya dana tersebut dibagikan ke SKPD-SKPD pelaksana untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Dengan demikian seluruh implementator tidak akan kesulitan mencari dana untuk program Minapolitan seperti yang selama ini terjadi.
2. Untuk komunikasi antar organisasi perlu adanya penambahan intensitas pertemuan seluruh tim koordinasi dan tim pokja demi mempercepat proses pelaksanaan program Minapolitan dengan tidak mengabaikan sisi kualitas dari setiap pertemuan rutin tersebut. Dengan kata lain seluruh tim koordinasi dan tim pokja harus hadir tanpa terkecuali, memberikan laporan progres masing-masing bidang pokja per triwulan serta kendala yang dihadapi, memberikan rancangan atau rencana kerja untuk program Minapolitan per triwulan agar dapat disinkronkan dengan tim pokja bidang yang lainnya, dan memberikan saran maupun kritik yang membangun demi kemajuan program Minapolitan. Terkait komunikasi antara pemerintah

dengan forum CSR dalam hal bantuan kepada masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasinya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Komunikasi tersebut dapat diwujudkan dengan cara Forum CSR dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi dan tim pokja Minapolitan Kabupaten Banjarnegara.

3. Terkait disposisi pelaksana, perlu adanya sistem *reward and punishment* untuk memotivasi seluruh implementator. *Reward* dalam hal ini bisa berupa penghargaan secara khusus bagi tim pokja Minapolitan yang telah menunjukkan kinerjanya secara optimal sehingga dapat memacu tim pokja lainnya untuk bekerja lebih baik lagi. Meningkatkan *sense of belonging* terhadap program Minapolitan bahwa program ini adalah milik bersama dan tanggung jawab bersama tanpa memandang bidang utama dalam program Minapolitan adalah perikanan, tetapi lebih melihat secara luas manfaat dari program tersebut demi kemajuan Kabupaten Banjarnegara. Untuk mewujudkan itu semua peran para pemimpin dari masing-masing SKPD maupun instansi yang terlibat sangat dibutuhkan. Pemimpin yang bertanggung jawab, totalitas, berkomitmen kuat, berintegritas, dan dapat memotivasi pegawainya sangat diperlukan untuk menunjang implementasi program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara.
4. Saran untuk struktur birokrasi, perlu adanya SOP yang mengatur tentang implementasi program Minapolitan, baik secara keseluruhan, per masing-masing bidang pokja, hingga per masing-masing SKPD yang terlibat. Hal ini memiliki fungsi ganda yaitu untuk mempermudah implementator dalam melaksanakan program Minapolitan dan sebagai alat untuk memonitor apakah proses yang

berjalan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak sekaligus dapat segera diketahui penyebabnya. Selain itu untuk fragmentasi yang ada di dalam proses pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara hendaknya perlu diperhatikan jumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Semakin banyak yang terlibat akan semakin sulit dalam berkoordinasi sehingga mengakibatkan terhambatnya implementasi program. Bentuk struktur birokrasi ataupun struktur organisasi yang melebar akan membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan struktur organisasi yang memiliki bentuk vertikal dan ramping. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengkaji ulang siapa saja dan berapa pihak yang terlibat yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat dan memiliki kemampuan untuk dapat mengemban tugas yang lebih banyak dari sebelumnya. Artinya pembagian tugas dan tanggung jawab tidak terlalu tersebar sehingga akan lebih mudah dalam hal pengendalian, pengawasan, serta tentunya kemudahan dalam berkoordinasi. Hal tersebut bertujuan agar proses pembangunan di kawasan Rajapurbawa khususnya sarana dan prasarana seperti yang ada di dalam master plan bisa lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Erwan Agus Purwanto dan Dyan Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Harbani Pasolong. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Irfan Islamy. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy: Analisis, strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PNM.

J. Moleong dan Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant (2011). *Public Policy (edisi ketiga)*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sri Suwitri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penertbit Universitas Diponegoro

Sumber Internet :

1. <http://www.djpb.kkp.go.id/statistik.php?id=1>
Data produksi perikanan Indonesia.

2. <http://inspirasi bangsa.com/membangun-raksasa-tidur-indonesia-perikanan-budidaya/>
Data FAO tentang peringkat Indonesia dalam produksi perikanan budidaya.
3. <http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/ditjen-perikanan-budidaya-adakan-press-tour-ke-banjarnegara>
Data tentang potensi Kabupaten Banjarnegara dalam Bidang Perikanan.
9. Data-data terbaru tentang Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Banjarnegara dari Dintankannak Kabupaten Banjarnegara Bidang Perikanan.

Sumber Dokumen :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Rencana Induk Pengemb. Kawasan Minapolitan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
5. Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 050/344 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
6. Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 050/202 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 050/342/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Banjarnegara.
7. Buku panduan pelaksanaan program Minapolitan Perikanan Budidaya.
8. Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan RAJAPURBAWA Kabupaten Banjarnegara.